

# KRISIS AGRARIA SEBAGAI AKAR KEMISKINAN: Menuju Pandangan Relasional Mengenai Kemiskinan

Moh. Shohibuddin<sup>1</sup> & Endriatmo Soetarto<sup>2</sup>

“Studying poverty is not to be equated with studying poor people”  
— A. O’Connor (2001)

“A relational view, then, understands poverty as the effect of social relations, understood not narrowly in terms of connectivity or networks, but in terms of inequalities of power”  
— David Mosse (2007)

Tulisan ini disusun sebagai pokok-pokok pikiran awal, dan dimaksudkan sebagai penghargaan kepada Prof. Dr. Djoko Suryo yang telah banyak memberikan kontribusi ilmiah bagi studi sejarah maupun studi agraria di Indonesia.

Apa yang hendak diajukan oleh tulisan ini adalah sebuah ajakan untuk melihat kemiskinan bukan sebagai *kondisi* yang statis, melainkan *konsekuensi* dari suatu relasi kuasa tertentu yang bersifat timpang. Dan salah satu yang terpenting dari relasi kuasa yang timpang itu adalah “relasi-relasi di bidang agraria”.

Pembahasan yang akan diberikan oleh tulisan ini ada pada dua tataran. Pertama adalah konseptualisasi mengenai bagaimana dinamika kapitalisme agraria di Indonesia telah melahirkan proses akumulasi, penyisihan, diferensiasi dan eksploitasi; dan seiring dengan itu semua adalah proses terciptanya kemiskinan. Dan kedua adalah tawaran kerangka penelitian yang mengintegrasikan variabel-variabel dinamis yang berkaitan dengan soal tenurial, hubungan produksi, keberlanjutan layanan alam, dan organisasi sosial untuk mengidentifikasi kondisi *socio-economic insecurity* suatu masyarakat. Namun sebelum memasuki kedua pembahasan itu, terlebih dulu akan disajikan uraian mengenai perspektif relasional dalam memandang kemiskinan.

\*\*\*

Pada galibnya, kemiskinan oleh para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan lebih sering dilihat sebagai sebuah “kondisi” ketimbang “konsekuensi”.

---

<sup>1</sup> Peneliti pada Sajogyo Institute (SAINS) Bogor dan asisten pengajar pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB.

<sup>2</sup> Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta dan staf pengajar Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB.

Sebagai kondisi, maka parameter yang digunakan untuk melihat kemiskinan adalah ukuran-ukuran yang *statis*, seperti kondisi tempat tinggal, jenis dan jumlah asupan gizi, tingkat pendapatan, tingkat kepemilikan aset, dan sebagainya. Kemiskinan merupakan “atribut negatif” dari ukuran-ukuran ini dalam suatu gradasi. Demikianlah maka kondisi kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Departemen Sosial misalnya, memperkenalkan istilah: Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III plus. Berdasarkan ini, maka intervensi-intervensi kunci dapat disusun, direncanakan, dan kemudian dilaksanakan untuk dapat “mengentaskan” keluarga-keluarga miskin dari satu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi.

Pandangan semacam ini pada dasarnya adalah konstruksi mengenai kemiskinan yang a-historis karena melepaskannya dari perkembangan sejarah berikut aneka faktor yang membentuk dan mempertahankannya. Kemiskinan dalam hal ini justru dianggap sebagai ciri sosial yang *discrete*, terukur dan gamblang; ketimbang melihatnya sebagai bersifat relasional dan terkait dengan hubungan-hubungan kuasa yang dinamis dalam konteks ruang dan waktu. Bagaimanapun, cara pandang seperti itulah yang kemudian memungkinkan pengukuran kemiskinan menurut indikator-indikator kuantitatif yang tentu saja berlaku generik, tanpa mempedulikan keragaman konteks dan sejarah.

Apa yang tidak tertangkap dari konstruksi semacam itu adalah bahwa kondisi kemiskinan, baik pada tingkat rumah tangga ataupun komunitas, memiliki sejarah dan dinamika yang berbeda-beda. Status dan kondisi kemiskinan boleh saja serupa pada, misalnya, berbagai komunitas adat terpencil. Akan tetapi, tanpa memahami berbagai proses yang membentuk kemiskinan dan ketimpangan, dan mekanisme-mekanisme sosial yang membuatnya terus bertahan dan berlanjut (bahkan dicipta kembali), maka penetapan level-level kesejahteraan maupun introduksi program-program pengentasan kemiskinan konvensional, tidak bakal dapat menjawab problem kemiskinan pada akar permasalahannya.

Secara praktis, penanganan pada “hilir” masalah kemiskinan tanpa memahami “hulu” dan “aliran” yang menjadi penyebab dan mekanismenya dapat disebut sebagai “kebijakan ujung pipa” yang tidak menjamin proses reproduksi kemiskinan dapat dihentikan. Suatu keluarga yang karena satu program pemerintah dapat naik ke satu jenjang peringkat kesejahteraan tidak ada jaminan sama sekali bahwa esok harinya dia tidak jatuh ke jenjang semula, atau bahkan lebih bawah lagi. Kasus desa-desa transmigran yang pernah diteliti kedua penulis di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memberikan ilustrasi yang menarik. Penduduk miskin dari Bali dan Lombok yang ditransmigrasikan ke daerah ini pada akhir 1970-an dan awal 1980-an telah mencapai taraf kehidupan yang jauh lebih sejahtera; untuk kemudian pada awal 2000-an diharuskan untuk direlokasi karena desa-desa mereka termasuk dalam Kuasa Pertambangan yang entah bagaimana telah bertumpang tindih dengan areal transmigrasi. Inilah contoh kontemporer dari apa yang

pernah Marx sebut sebagai proses *enclosure*,<sup>3</sup> yaitu “sejarah pemisahan produser dari alat produksinya”; “ketika sejumlah besar orang tiba-tiba dicerabut secara paksa dari caranya melanjutkan hidup, dan terlempar menjadi proletariat bebas dan ‘melalu bergantung’ pada pasar tenaga kerja” (dikutip dalam Fauzi, *in press*).

Oleh karena itu, suatu perspektif mengenai kemiskinan yang bersifat relasional amatlah diperlukan untuk dapat membongkar proses-proses pembentukan kemiskinan semacam ini. Dalam pandangan relasional, maka kemiskinan dilihat bukan pertama-tama sebagai *kondisi* melainkan *konsekuensi*. Sebagai suatu konsekuensi, maka ia merupakan efek dari relasi-relasi sosial, yang tidak terbatas dalam pengertian koneksi atau jaringan semata (asumsi di balik teori modal sosial yang individualistis), melainkan dalam pengertian hubungan-hubungan kekuasaan yang timpang (Mosse 2007).

Dengan demikian, persoalan mengapa orang menjadi miskin, atau mengapa kemiskinan terus bertahan dan diciptakan ulang, harus dipandang sebagai hasil dari beroperasinya berbagai relasi kuasa yang timpang ini, ketimbang sebagai produk dari proses-proses yang abnormal dan patologis. Suatu “kepekaan ekonomi politik (*a sense of political economy*) menjadi esensial” di sini untuk dapat “menyibakkan hubungan-hubungan historis yang menciptakan ketimpangan distribusi kekuasaan, kemakmuran dan kesempatan di tengah-tengah masyarakat” (Du Toit dalam Mosse 2007).

\*\*\*

Untuk negara agraris seperti Indonesia, penguasaan atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya (*land and resource tenure*) sangatlah menentukan karena hal itu merupakan “masalah penghidupan dan kemakmuran bangsa” (meminjam judul buku Moch. Tauchid<sup>4</sup>). Oleh karena itu, jaminan *tenurial security* atau perlindungan atas kepastian dan keberlangsungan penguasaan rakyat atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi keharusan tersendiri. Amanat konstitusi kita secara tegas menyatakan keharusan menjadikan tanah dan kekayaan alam lainnya itu sebagai sumber bagi “sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 UUD 1945).

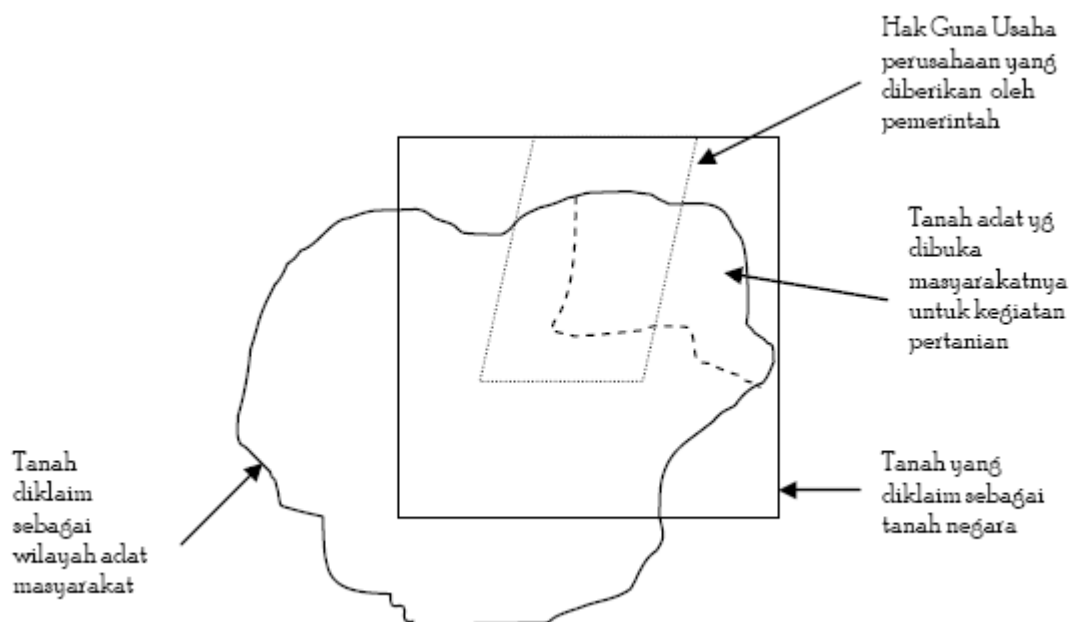
Masalah tenurial memang tidak bisa dilepaskan dari sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan menyangkut persoalan kekuasaan. Oleh karena itu, perhatian pada masalah tenurial ini ditekankan pada hubungan antara kepemilikan sumberdaya tertentu dalam suatu sistem penguasaan, dan pola-pola hubungan yang terjadi antar berbagai pihak menyangkut penguasaan atas sumberdaya itu. Jadi dalam suatu sistem tenurial terdapat penentuan siapa yang memiliki hak untuk menggunakan sumberdaya tertentu (aspek *de jure*) dan siapa yang dalam kenyataannya menggunakan sumberdaya tersebut (aspek *de facto*) (Fauzi 2002).

---

<sup>3</sup> Secara harfiah *enclosure* berarti pemagaran, namun yang dimaksudkan di sini adalah suatu proses pergeseran penguasaan tanah yang mengakhiri hak-hak tradisional melalui mekanisme pengaplingan tanah-tanah yang berciri sumberdaya bersama menjadi tanah-tanah pribadi dengan batasan yang tegas.

<sup>4</sup> Buku ini atas seijin ahli waris sedang dalam proses cetak ulang oleh STPN Press.

Menurut Afiff (2005), masalah tenurial mencuat ketika terjadi dominasi dalam relasi-relasi agraria menyangkut klaim penguasaan atas sumberdaya tertentu. Hal ini terjadi karena aturan hukum yang dikeluarkan negara dalam menetapkan hak atas sebidang tanah dan sumber-sumber alam lainnya seringkali tidak mengadopsi atau bahkan bertolak belakang dengan praktik-praktik sehari-hari dan kebiasaan yang telah turun temurun berlaku dalam sebuah masyarakat. Di sinilah terjadi persoalan legitimasi penguasaan, yaitu antara yang berdasarkan *de jure* dan *de facto*. Legitimasi secara *de jure* mendasarkan pada kepemilikan formal menurut aturan hukum yang dianggap sah oleh negara atau pemerintah. Sedangkan legitimasi secara *de facto* mengacu pada cara-cara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan yang dipercayai, digunakan, dikenal dan berlaku berdasarkan hukum atau aturan yang dipraktikkan masyarakat selama ini, misalnya berdasarkan praktik-praktik adat setempat. Afiff menggambarkan tumpang tindih klaim semacam ini melalui gambar sebagai berikut.



Dalam kaitan ini, maka momen historis pembentukan kemiskinan pada suatu masyarakat lokal sebenarnya bermula dari konflik tenurial semacam di atas, yaitu ketika dominasi negara dalam relasi-relasi agraria telah menyebabkan tercerabutnya hak-hak penguasaan masyarakat lokal atas tanah dan sumberdaya alam lainnya di satu sisi, dan di sisi lain terakumulasinya penguasaan sumber-sumber agraria itu pada badan-badan usaha yang memiliki kekuatan modal besar. Seperti dijelaskan Fauzi (2002: 341):

“... penyebab utama dari konflik *tenurial* bersumber dari adanya dominasi suatu sistem penguasaan yang datang atau berasal dari hukum negara, yang secara sepihak memberikan layanan begitu besar pada pemilik-pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam mengelola sumber tanah dan sumberdaya alam lain termasuk hasil-hasil hutan. Sementara itu, hak-hak masyarakat setempat yang telah hidup dan mengembangkan suatu sistem

tersendiri untuk mengelola tanah dan sumberdaya alam lain tersebut diabaikan dan dilanggar dengan begitu saja.

Dengan demikian, problem kemiskinan dan krisis pedesaan yang banyak terjadi pada masyarakat lokal sebenarnya berakar dari “krisis agraria” semacam ini. Inilah krisis yang menyeruak seiring dengan terjadinya proses “ekspansi kapitalisme” ke dalam dunia pedesaan pra-kapitalis; suatu proses transformasi besar (*great transformation*) yang secara drastis merombak relasi-relasi sosial dalam proses produksi, terutama relasi kepemilikan (*property relations*). Dalam proses inilah tanah-tanah dan kekayaan alam mulai diputuskan dari relasi-relasi sosial pra-kapitalis, dan kemudian dijadikan sebagai bagian dari modal dalam sirkuit cara produksi kapitalis. Di lain pihak, para petani yang semula memiliki hubungan erat dengan tanah dan kekayaan alam itu dilepaskan dari hubungan tersebut secara brutal, dan lantas dibiarkan lepas sebagai tenaga kerja bebas (Fauzi, *in print*).

Dalam literatur Marxian, proses inilah yang diistilahkan dengan “akumulasi primitif”, yaitu ketika kekayaan dan keuntungan diakumulasikan sebagai syarat perlu bagi terjadinya titik tolak perkembangan kapitalisme. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa proses akumulasi ini tidaklah berlangsung sekali jadi pada tahap awal perkembangan kapitalisme semata, namun merupakan bagian tak terpisahkan dari cara produksi kapitalis itu sendiri. Dengan demikian, dalam kasus masyarakat adat di Nusantara, proses akumulasi primitif ini tidak hanya berlangsung pada masa awal persentuhan dengan negara-negara Barat—mula-mula melalui hubungan perdagangan dan kemudian berlanjut menjadi dominasi dan penjajahan. Alih-alih, proses akumulasi ini, seperti ditunjukkan de Angelis (2004), tak lain adalah daya dari modal itu sendiri sebagai *enclosing social forces* atau kekuatan-kekuatan sosial yang menimbulkan proses pengkaplingan. Oleh sebab itu *enclosure* diartikan sebagai ciri yang melekat pada cara produksi kapitalisme yang berkecenderungan mengkolonisasi seluruh kehidupan.

Proses ekspansi kapitalisme semacam inilah yang melahirkan proses marjinalisasi dan terbentuknya kemiskinan pada masyarakat adat, namun juga pada masyarakat pedesaan secara umum. Seperti dikemukakan de Angelis (2004: 58), “... there is no enclosure of commons without at the same time the destruction and fragmentation of communities.” Wiradi (2009a) mengemukakan tiga jenis “ketimpangan agraria” yang tercipta dari proses semacam ini, yaitu:

- (1) ketimpangan dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah;
- (2) ketimpangan dalam hal peruntukan tanah; dan
- (3) ketimpangan dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria.

Ketimpangan pertama bertumpu pada asumsi tidak seimbang rasio kuantitas dan kualitas antara pemilik dan penguasa tanah dengan mereka yang tidak memiliki tanah dan tidak mempunyai kuasa atas tanah. Ketimpangan kedua terkait dengan azas fungsi tanah. Ambisi pemerintah atas pencapaian industrialisasi dan

pertumbuhan ekonomi yang dihela oleh usaha skala modal besar telah menggeser prioritas pembangunan dari sektor pertanian ke industri yang padat modal. Peruntukan tanah diprioritaskan untuk mendukung industrialisasi ini sehingga tanah pertanian banyak dialihfungsikan kepada peruntukan industri, termasuk melalui penggusuran para petani kecil.

Adapun ketimpangan ketiga tampak dari pertarungan kepentingan dan klaim atas tanah antara negara melawan masyarakat adat. Klaim negara didasarkan pada konsep-konsep hukum positif (formal/legal dari Barat), sementara masyarakat adat berpijak pada berbagai hak atas tanah menurut konsepsi adat masing-masing. Di satu sisi rakyat menganggap tanah adalah tumpuan kehidupannya, sementara di sisi lain negara merasa berhak untuk meminta “pengorbanan” dari rakyat agar menyerahkan tanahnya demi “pembangunan” (cf. Gunawan 2008).<sup>5</sup>

\*\*\*

Namun selain berlangsung “dari atas” berkat fasilitasi dan dukungan ekstra ekonomi dari negara (baik negara kolonial maupun pasca kolonial), ekspansi kapitalisme sebenarnya juga bisa berlangsung “dari bawah”, yakni melalui relasi-relasi agraris di antara anggota masyarakat sendiri menyangkut perebutan akses dan kontrol atas tanah, modal dan tenaga kerja. Proses ekspansi kapitalisme “dari bawah” ini, tanpa ayal, juga telah berlangsung dengan massif pada masyarakat lokal yang dampaknya tidak kalah besarnya dibandingkan proses ekspansi kapitalisme yang berlangsung “dari atas”.

Yang menarik adalah bahwa proses semacam ini juga berlangsung bahkan di dalam konteks aksi “reklam tanah dari bawah” (*land reform by leverage*), baik yang terorganisir maupun bukan. Seperti akan ditunjukkan di bawah, gerakan-gerakan sosial pedesaan itu sementara dengan sadar dimaknai sebagai perlawanan kolektif terhadap “kapitalisme dari atas”, ia gagal untuk mengidentifikasi proses-proses “kapitalisme dari bawah” yang berlangsung di antara mereka sendiri, dengan dampak akumulasi dan penyingkiran yang serupa dari yang pertama, hanya kali ini terjadi di antara kelas-kelas sosial di dalam masyarakat sendiri.

Secara singkat, proses akumulasi dari bawah di antara masyarakat sendiri ini pada dasarnya terjadi melalui apa yang disebut sebagai “diferensiasi agraria”. White (1998: 20) mendefinisikan proses diferensiasi agraria ini sebagai:

“... suatu perubahan yang kumulatif dan permanen dalam berbagai cara di mana kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat desa—dan beberapa di luarnya—mendapatkan akses kepada hasil-hasil dari jerih payah

---

<sup>5</sup> Sepanjang sejarahnya, ekspansi kapitalisme yang melahirkan ketiga konteks ketimpangan di atas pada dasarnya merupakan sejarah perampasan tanah yang brutal; suatu sejarah “yang ditulis dengan tinta api dan darah” untuk meminjam istilah yang digunakan Karl Marx ketika membahas sejarah perampasan tanah (*enclosure*) di Inggris pada masa awal perkembangan kapitalisme.

tenaga kerjanya sendiri ataupun orang lain, menurut perbedaan penguasaan mereka atas sumber-sumber produksi, dan seringkali ... menurut ketimpangan yang kian meningkat dalam hal akses atas tanah”.

Berdasarkan definisi White di atas, menjadi jelas bahwa perbedaan akses sebagian penduduk desa atas tanah dan sumber-sumber produksi lainnya telah melahirkan adanya perbedaan kekuasaan di antara mereka di dalam mengekstraksi surplus produksi dan mengakumulasi kekayaan. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan pengelompokan kelas-kelas sosial-ekonomi yang makin menajam di pedesaan. Demikianlah, melalui proses diferensiasi agraria ini masyarakat desa yang semula relatif homogen berubah menjadi semakin terstratifikasi ke dalam kelas-kelas sosial ekonomi.

Di banyak tempat, proses diferensiasi ini didorong oleh komersialisasi sistem pertanian yang kian meningkat, baik sebagai dampak intensifikasi pertanian pangan yang padat modal (melalui pelaksanaan Revolusi Hijau) ataupun introduksi komoditi ekspor (*cash crop*). Untuk kasus pertama, penelitian Survey Agro Ekonomi (SAE) pada dekade 1970-1980-an memberikan perbandingan menarik mengenai bagaimana proses perubahan agraria yang berlangsung pasca pelaksanaan Revolusi Hijau di desa-desa pertanian padi sawah. Secara padat, aspek-aspek perubahan agraria itu diringkaskan oleh Wiradi (2009b: 136-137) sebagai berikut:

- Terjadinya proses pemusatan penguasaan tanah, baik melalui sewa-menyewa, gadai-menggadai, maupun melalui pemilikan dengan pembelian.
- Tingkat ketunakismaan yang bertambah tinggi. Kesempatan para tunakisma untuk dapat menguasai tanah melalui sewa-menyewa dan bagi hasil semakin terbatas karena ada kecenderungan para pemilik tanah lebih suka menggarap tanahnya sendiri daripada menggarapkannya (melalui sewa/bagi hasil) kepada orang lain.
- Walaupun umumnya proporsi pendapatan dari sektor non-pertanian lebih besar daripada yang bersumber dari sektor pertanian, namun luas kepemilikan tanah ternyata berjalan sejajar dengan tingkat kecukupan. Ini berarti bahwa jangkauan terhadap sumber-sumber di luar sektor pertanian lebih dimiliki oleh para pemilik tanah luas daripada pemilik tanah sempit atau lebih-lebih para tunakisma.
- Pada strata pemilikan tanah yang sempit dan tunakisma terdapat proporsi rumah tangga miskin yang lebih besar. Dengan demikian berarti bahwa pemilikan tanah tetap merupakan faktor yang turut menentukan tingkat hidup di pedesaan.

Sementara itu, untuk kasus kedua, studi Tania Li tentang “booming komoditas kakao” di Sulawesi Tengah memberikan perbandingan menarik mengenai bagaimana proses komersialisasi pertanian yang didorong oleh introduksi komoditi pasar. Dengan

merujuk pada komunitas Lauje, sebuah komunitas adat di dataran tinggi Sulawesi Tengah, Li (2002: 422) menunjukkan bahwa:

“Introduksi tanaman komersial di wilayah perbukitan komunitas Lauje telah memotong siklus perladangan berpindah. Pohon kakao mulai ditanam di tanah ladang berpindah bersama-sama dengan tanaman jagung, dan terus diulang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak ada lagi ladang yang tersisa. Dan seiring dengan transformasi lanskap ini terjadi pula transformasi sosial yang berlangsung dalam tiga tahap. Hal ini mencakup *enclosure*, komoditisasi, dan akumulasi yang timpang (*uneven accumulation*) atas tanah, hingga pada satu titik di mana banyak petani Lauje secara efektif saat ini menjadi tuna kisma.

Lebih lanjut, tiga tahapan proses diferensiasi agraria seiring dengan introduksi tanaman kakao ini diuraikan secara rinci oleh Li sebagai berikut (2002: 422-423):

“Tahap transformasi pertama adalah privatisasi tanah melalui penyingkiran ahli waris lainnya: tindakan menanam pohon kakao pada ladang berpindah akan membuatnya tertutup bagi orang lain, dan akan mengeluarkannya dari ladang yang menjadi warisan bersama sebuah keluarga besar. Pada serbuan penanaman tahap awal, petani yang lebih banyak mempunyai modal, tenaga kerja dan pengetahuan genealogis mengenai di mana leluhurnya dulu pernah membuka hutan mampu mengkonsolidasikan penguasaan atas areal tanah yang luas. Sebaliknya, mereka yang lebih lambat memulai, dan mereka yang tidak memiliki klaim warisan leluhur, gagal memiliki tanah...”

“Pada tahap kedua, tanah yang telah diprivatisasi melalui sarana penanaman kakao, mulai diperlakukan sebagai komoditi yang dapat dijual ke pihak ketiga, suatu transaksi yang secara umum dianggap permanen. Para petani yang terdesak oleh kebutuhan uang tunai menjual areal belukar yang baru mereka tanami kakao kepada tetangganya yang lebih mampu, satu bidang tanah pada satu saat, sampai mereka kini mendapati diri mereka menjadi buruh upah pada tanah yang pernah menjadi milik mereka...”

“Tahap ketiga adalah berlangsungnya proses konsentrasi dan penyingkiran, yaitu ketika para elit dari dataran rendah dan pengusaha dari kota yang mempunyai banyak modal membeli kebun-kebun kakao di dataran tinggi...”

Dari perbandingan dua kasus di atas dapat terlihat dengan jelas bagaimana cara dan mekanisme perubahan agraria yang terjadi seiring berlangsungnya *capitalism from below*, dan pengaruhnya pada pembentukan kemiskinan dan kesenjangan di tengah penduduk pedesaan. Pengaruh ini tidaklah kurang besarnya dari yang ditimbulkan oleh penetrasi negara dan “kapitalisme dari atas”—suatu proses yang banyak dihiraukan, sementara pasangan kekuatan itu yang rutin bergerak “dari bawah” cenderung diabaikan. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa proses-proses akumulasi, penyisihan dan diferensiasi itu ternyata juga berlangsung di antara komunitas-komunitas yang terlibat dalam berbagai aksi reklamasi tanah untuk melakukan *land reform by leverage*.

Meminjam tipologi yang dikembangkan Sitorus et al (2005), berbagai aksi *land reform by leverage* itu dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu: aneksasi, kultivasi, dan integrasi. Aneksasi adalah tipe *land reform* dari bawah yang merujuk pada tindakan kolektif penduduk untuk secara paksa dan ilegal membuka, bercocok-tanam, dan sekaligus bermukim di sebidang tanah hutan negara/perkebunan HGU. Sebaliknya, integrasi adalah tipe *land reform* yang merujuk pada kolaborasi negara dan komunitas lokal yang biasanya terdapat dalam konteks manajemen sumberdaya hutan. Kultivasi berada di antara kedua tipe yang bertentangan itu. Kultivasi merujuk pada ambiguitas status tanah yang direklaim: di satu sisi ia direklaim dan secara faktual ditanami atau diusahakan oleh penduduk (biasanya melalui perjanjian informal), tetapi di lain sisi ia secara formal masih diklaim dan juga secara faktual dikelola sebagai bagian dari entah kawasan konservasi, hutan produksi atau areal perkebunan besar.

Berbagai studi dan pengamatan lapang menunjukkan bahwa pasca reklamasi tanah, proses-proses akumulasi dan diferensiasi agraria ternyata juga berlangsung pesat di antara komunitas-komunitas yang melakukan inisiatif *land reform by leverage* dalam ketiga tipe di atas. Untuk kasus tipe pertama, hasil awal penelitian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bersama Sajogyo Institute pada tahun 2009 ini menemukan bahwa para pelaku reklamasi tanah di dataran tinggi Priangan ternyata tidak mampu untuk menangkai struktur ekonomi sayur mayur yang dicirikan oleh pasar output yang monopsonistik dan pasar input yang monopolistik. Bahkan patronase bandar-petani kecil juga berkembang luas di antara para petani pelaku reklamasi ini sedemikian rupa sehingga proses akumulasi kekayaan dan diferensiasi agraria juga sudah mulai terlihat mencolok.

Hal yang sama juga berlangsung pada tipe kultivasi. Studi Inoue et al (2003) di wilayah hulu waduk Cirata menunjukkan bahwa lahan kering (*pasir*) di kawasan hutan Perhutani selama ini dapat diakses oleh penduduk miskin, baik melalui mekanisme “kultivasi formal” (perjanjian tumpangsari dan program perhutanan sosial) maupun “kultivasi informal” (melalui kontrak-kontrak temporer dengan para mandor hutan). Dengan demikian, tanah hutan negara telah berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi lapisan bawah ini. Namun, proses komersialisasi juga tengah berlangsung pesat di sini yang dipicu oleh introduksi tanaman pisang daun seiring dengan tingginya tingkat permintaan daun pisang di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Menurut Herianto (dalam Tsujii dan Herianto 2008), proporsi sistem agroforestry khas Jawa Barat, *talun huma*, telah merosot drastis di daerah ini selama 10 tahun terakhir dari 95% menjadi 46%. Seiring dengan itu, proporsi areal tanaman pisang daun melonjak pesat dari 5% menjadi 54% pada periode yang sama.

Dengan demikian, kasus tipe kultivasi di hulu DAS Cirata ini mencerminkan kondisi di ambang proses diferensiasi pada tanah hutan negara, suatu proses yang sudah berlangsung terlebih dulu pada tanah *pasir* di lahan milik pribadi di luar kawasan

hutan. Arah dari proses ini pada akhirnya akan serupa dengan kasus di hulu DAS Cimanuk di mana komersialisasi dan diferensiasi agraria sudah berlangsung lama di tanah hutan negara yang ditanami penduduk dengan komoditi sayur mayur yang padat modal dan sangat ekspansif.<sup>6</sup>

Akhirnya, tipe integrasi juga tidak terlepas dari proses yang serupa. Seperti ditulis Shohibuddin (2008) untuk kasus kesepakatan konservasi berbasis adat di Taman Nasional Lore Lindu, tantangan keberlanjutan dari proses kolaborasi ini bukan terletak pada adaptasi ekosistemnya (sejauh ini kesepakatan konservasi cukup berjalan baik), akan tetapi justru terletak pada adaptasi sistem sosialnya. Hal ini terutama menyangkut sejauh mana artikulasi kearifan lokal dan revitalisasi adat yang digencarkan oleh para pemimpin komunitas ini dapat menjawab kondisi keragaman masyarakatnya, baik dalam arti budaya (mengingat komunitas ini bersifat multi etnis) maupun dalam arti diferensiasi agraria (mengingat kawasan ini juga mengalami “booming kakao” yang prosesnya telah dijelaskan dalam kutipan Tania Li di atas).

\*\*\*

Pada tataran empiris, proses-proses transformasi kehidupan, sumber nafkah dan basis sumberdaya masyarakat pedesaan memang selalu dibentuk dan didorong oleh kedua arus kekuatan kapitalisme sekaligus (“dari atas” dan “dari bawah”). Oleh karena itu, perhatian terhadap keduanya, terutama mekanisme-mekanisme yang menciptakan akumulasi di satu sisi dan pemiskinan di sisi lain, harus dilakukan secara berimbang. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai proses-proses agraria yang berlangsung di lapangan dan kekuatan-kekuatan pengarahannya dalam kedua arus kapitalisme tersebut (dari atas dan dari bawah).

Dalam konteks yang berbeda, ajakan serupa juga pernah dikemukakan oleh Tania Li (2001). Menurut Li, hanya melalui pemahaman atas proses perubahan agraria seperti itu maka pola-pola dan sebab-sebab kemiskinan dan ketimpangan dapat lebih dijernihkan. Dari sinilah baru dimungkinkan respon-respon yang lebih politis (bukan sebatas manajerial) pada berbagai tingkatan.

Dalam konteks tersebut, tulisan ini ingin menawarkan suatu kerangka penelitian yang dapat mengintegrasikan variabel-variabel dinamis yang berkaitan dengan soal tenurial, hubungan produksi, keberlanjutan layanan alam, dan organisasi sosial dalam rangka mengidentifikasi kondisi *socio-economic insecurity* suatu masyarakat secara lebih komprehensif dan relasional. Untuk itu, sebagai uraian penutup, pada bagian di bawah ini akan disajikan empat dimensi kerentanan sosial-ekonomi (*socio-economic insecurity*) sebagai suatu “denominator umum” untuk mencirikan relasi-relasi agraria

---

<sup>6</sup> Sebagaimana temuan awal dari penelitian Brighten Institute yang masih berlangsung mengenai kondisi sosial-ekonomi dan ekologi pada wilayah hulu DAS Cimanuk. Penulis pertama menjadi anggota tim dalam penelitian ini.

dan yang terkait yang menentukan kondisi kemakmuran dan kemiskinan masyarakat. Empat dimensi kerentanan sosial-ekonomi (KSE) dimaksud secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kerentanan yang terkait dengan penguasaan tanah dan sumberdaya lainnya (*land and resource tenure*);
2. Kerentanan dalam konteks relasi-relasi produksi;
3. Kerentanan dalam konteks keberlanjutan layanan alam; dan
4. Kerentanan yang terkait dengan relasi-relasi kuasa dalam isu organisasi sosial dan kepemimpinan.

Dalam tabel berikut ini disajikan secara lebih rinci variabel-variabel apa saja yang akan menentukan keamanan atau kerentanan sosial-ekonomi suatu masyarakat dalam keempat dimensi di atas.

KSE Terkait Penguasaan Tanah dan Sumberdaya Alam Lainnya (TSL)	KSE Terkait Relasi-relasi Produksi	KSE Terkait Keberlanjutan Layanan Alam	KSE Terkait Isu Organisasi dan Kepemimpinan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses dan kontrol atas TSL dan ketimpangannya</li> <li>• Dasar-dasar klaim atas TSL dan ketimpangannya</li> <li>• Dimensi gender dalam penguasaan TSL dan ketimpangannya</li> <li>• Kaitan tipe-tipe tata guna tanah dengan kepastian/kerentanan tenurial</li> <li>• Isu pluralisme hukum &amp; pengaruhnya terhadap kepastian/kerentanan tenurial</li> <li>• Pengaruh pengakuan formal dalam bentuk sertifikasi terhadap kepastian/kerentanan tenurial</li> <li>• Diferensi agraria dan kelas-kelas sosial-ekonomi di desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan-hubungan penyakapan dan pola interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat</li> <li>• Hubungan-hubungan perburuhanan dan pola interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat</li> <li>• Perubahan kelembagaan penyakapan dan hubungan kerja dan faktor-faktor penyebabnya</li> <li>• Dimensi gender dalam hubungan-hubungan produksi</li> <li>• Transformasi kesempatan kerja pedesaan akibat perubahan sistem produksi, alih komoditi, perubahan bentang alam, dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persepsi mengenai alam, kepemilikan, dan akses yang didefinisikan secara berlainan menurut latar belakang budaya dan kelas</li> <li>• Setting kelembagaan yang mempengaruhi pola interaksi manusia dengan alam</li> <li>• Transformasi alam akibat perubahan pola produksi, komoditi, rezim pengelolaan, dll</li> <li>• Isu-isu terkait dengan daya dukung ekologi dan perubahan iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relasi-relasi kuasa terkait otoritas dan legitimasi</li> <li>• Relasi-relasi kuasa terkait elit dan orang biasa</li> <li>• Relasi-relasi kuasa terkait etnis asli dan etnis pendatang</li> <li>• Relasi-relasi kuasa antara lelaki dan perempuan</li> <li>• Relasi-relasi kuasa antar komunitas desa</li> <li>• Relasi-relasi kuasa terkait kesenjangan generasi dan isu keberlanjutan antar generasi</li> <li>• Relasi-relasi kuasa antara komunitas desa dengan lingkungan ekologi politik yang lebih luas (pemerintah, LSM, dll)</li> </ul>

KSE Terkait Penguasaan Tanah dan Sumberdaya Alam Lainnya (TSL)	KSE Terkait Relasi-relasi Produksi	KSE Terkait Keberlanjutan Layanan Alam	KSE Terkait Isu Organisasi dan Kepemimpinan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses-proses transformasi yang terjadi dalam konteks perubahan ekonomi politik dan ekologi yang lebih luas</li> </ul>			

Kerangka penelitian di atas barulah merupakan sebuah inventarisasi variabel-variabel kunci yang harus dikembangkan lebih lanjut konseptualisasi dan teorisasinya. Bagaimanapun, hal itu dapat menjadi langkah awal untuk melihat bagaimana relasi-relasi agraria merupakan proses kunci dalam melihat bagaimana akumulasi kekayaan terjadi dengan sisinya yang lain adalah terciptanya marginalisasi dan kemiskinan.

\*\*\*

Pada bagian penutup ini kedua penulis ingin menggarisbawahi bahwa analisis mengenai “kemiskinan sebagai konsekuensi dari relasi-relasi agraria yang timpang” seperti diajukan di atas tidak akan berhasil dengan baik tanpa disertai dengan sudut pandang kesejarahan yang kuat. Aspek yang terakhir ini belum banyak ditekankan oleh tulisan ini, tetapi hal itu sekaligus merupakan ruang yang terbuka untuk dikembangkan oleh berbagai peneliti, khususnya kalangan sejarawan. Semoga!

## DAFTAR RUJUKAN

- Afiff, Suraya (2005) “Tinjauan atas Konsep ‘Tenure Security’, dengan Beberapa Rujukan pada Kasus-Kasus di Indonesia.” *Wacana*, Edisi 20, Tahun VI: 225-247.
- Burkard, Günter (2008) “‘Stability’ or ‘Sustainability’? Changing Conditions of Socio-economic Security and Processes of Deforestation in a Rainforest Margin” in Günter Burkard and Michael Fremerey (eds) *A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia*. Berlin: Lit Verlag.
- De Angelis, Massimo (1999) “Marx’s Theory of Primitive Accumulation: A Suggested Reinterpretation.” Working Paper No. 29, Department of Economics, University of East Anglia London, <http://homepages.uel.ac.uk/M.DeAngelis/PRIMACCA.htm>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2009.
- De Angelis, Massimo (2004) “Separating the Doing and the Deed: Capital and the Continuous Character of Enclosures.” *Historical Materialism* 12(2): 57–87.
- Fauzi, Noer (2002), “Konflik Tenurial: yang Diciptakan Tapi Tak Hendak Diselesaikan” dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (eds), *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist Press.
- Fauzi, Noer (*in press*) “Desentralisasi dan Community Driven Development dalam Konteks Pembangunan Kapitalis: Suatu Kajian Teoritis.” Akan dimuat dalam Majalah Prisma.
- Gunawan, Bondan (2008) “Mengurai Benang Kusut Agraria: Menuju Kemakmuran dan Keadilan bagi Masyarakat Adat di Indonesia.” Makalah disampaikan dalam Muswil Aliansi Masyarakat Adat Babel, 11 April 2008.
- Inoue, Makoto, Yuuki Tsurudome, Siti Sugiah M. Mugniesyah (2003) “Hillside Forest Land as a Safety Net for Local People in a Mountain Village in West Java: An

- Examination of Differences in the Significance of National and Private Lands.”  
*Journal of Forest Resource* 8: 95-101.
- Li, Tania M. (2001) “Agrarian Differentiation and the Limits of Natural Resource Management in Upland Southeast Asia.” *IDS Bulletin* 32(4): 88-94.
- Li, Tania M. (2002) “Local Histories, Global Markets: Cocoa and Class in Upland Sulawesi.” *Development and Change* 33(3): 415-437.
- Mosse, Adam (2007) “Power and the Durability of Poverty: a Critical Exploration of the Links between Culture, Marginality and Chronic Poverty.” Working Paper 107, Chronic Poverty Research Centre.
- O’Connor, A. (2001) *Poverty Knowledge: Social Science, Social Policy and the Poor in Twentieth Century US History*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Shohibuddin, M. (2008) “Discursive Strategies and Local Power in the Politics of Natural Resource Management” in Günter Burkard and Michael Fremerey (eds) *A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia*. Berlin: Lit Verlag.
- Shohibuddin, Moh. dan Soeryo Adiwibowo (2009) “Sejauh Mana Upaya-upaya Kolaborasi Bisa Koadaptif? Kasus Kesepakatan Konservasi Berbasis Adat di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah.” Paper disampaikan pada Lokakarya Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam, diselenggarakan atas kerjasama WWF Indonesia dengan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB, 29-30 Oktober 2009.
- Sitorus, MT. Felix, Soeryo Adiwibowo, Laksmi A. Savitri, Michael Fremerey (2005) “Forestland Reclaiming: Types of Agrarian Reform by Leverage in Upland Central Sulawesi” dalam *Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi*. Jakarta: KPA, HUMA, KARSA, CIFOR, WALHI, JKPP, RACA, ICRAF, ARUPA, ELSAM, PKWJ-UI, INDIRA PROJECT, YAYASAN KEMALA.
- Tsuji, Hiroshi and Ageng Setiawan Herianto (2008) “Sustainability of Agroforestry and Poverty in a Miuntanious Village of West Java and Satoyama in Japan.” Paper

presented at the UNU Global Seminar 8<sup>th</sup> Kanazawa Session on Challenges to Sustainable Development.

White, Ben (1989) "Problems in the Empirical Analysis of Agrarian Differentiation" in G. Hart, A. Turton, B. White (eds) *Agrarian Transformation: Local Processes and the State in Southeast Asia*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Wiradi, Gunawan (2009a) *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Edisi Baru. Penyunting: Noer Fauzi, penyelaras Edisi Baru: Moh. Shohibuddin. Jakarta, Bogor, Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute, AKATIGA.

Wiradi, Gunawan (2009b) *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Penyunting: Moh. Shohibuddin. Bogor: Sajogyo Institute, Pusat Kajian Agraria dan Departemen Sains KPM IPB.